

**ANALISIS KELEMBAGAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT
POLA PLASMA MENGHADAPI PASAR GLOBAL DI KECAMATAN
UKUI KABUPATEN PELALAWAN**

**INSTITUTIONAL ANALYSIS OIL PALM OF SCHEME SMALLHOLDERS
TOWARDS GLOBAL MARKET IN DISTRICT OF UKUI
REGENCY OF PELALAWAN**

Masa Derita Ndraha¹, Sakti Hutabarat², Kausar²
Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture University of Riau
Jl. Binawidya 30, Pekanbaru 28291
masadraha@yahoo.co.id

ABSTRACT

Development of oil palm plantation creates positive and negative impacts to people, environment and economy. Growing awareness of global consumers on sustainable oil palm production provokes some international institutions to establish standards and certification. The role of institutions in palm oil supply chain become an important issue to assure that the process of palm oil production is traceable. The objective of this study is to identify various institutions in oil palm supply chain and analyse the role of relevant institutions in scheme smallholders level such as access inputs, access financial, access market, access information and technology, access land title, and access institutional. The study used descriptive qualitative methods to figure out market coordination in the oil palm market. Data were collected from sample farmers and manager of each institutions. The results show that there are various institutions involve in oil palm supply chain at scheme smallholders including cooperatives, millers, local government, banks, local trader, and NGO. The institutions have different roles in the oil palm supply chain to produce sustainable oil palm production under RSPO certification.

Keywords: Scheme smallholders, Institutions, Global market, Certification

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit menjadi komoditi unggulan saat ini di Indonesia, hal ini terbukti dari tahun ke tahun perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kelapa sawit sangat penting artinya bagi Indonesia dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini sebagai komoditi andalan untuk ekspor maupun komoditi yang diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan petani (Lubis, 1992). Perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia tidak terlepas dari adanya aktor-aktor di sektor perkebunan kelapa sawit.

Aktor-aktor yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit antara lain produsen benih, produsen pupuk, perusahaan perkebunan kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, pemerintah, pedagang perantara (TBS), dan lembaga pendukung lainnya. Menurut Munandar (2010), lembaga yang paling berperan penting dalam

1. Mahasiswa Fakultas Pertanian UR
2. Dosen Fakultas Pertanian UR
Jom Faperta Vol 1 No 2 Oktober 2014

perkebunan kelapa sawit adalah pemerintah dan lembaga pendukung yang terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Aktor-aktor tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain dalam membangun dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan faktor-faktor produksi sehingga perkebunan kelapa sawit dapat berproduksi dengan tren yang semakin meningkat.

Teori produksi merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana seharusnya seorang pengusaha atau produsen memilih teknologi tertentu dan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah produksi dengan cara yang paling efisien (Suherman, 2000). Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman supaya tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik (Soekartawi, 2003). Keberhasilan produksi perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh kombinasi yang tepat dari faktor produksi dan teknik budidaya. Faktor produksi terdiri dari empat komponen yaitu tanah, modal, tenaga kerja dan skill atau manajemen. Keempat faktor ini saling bersinerji dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses produksi.

Produksi perkebunan kelapa sawit dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Riau dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 produksi perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 produksi total CPO adalah 6,9 juta ton dan pada tahun 2013 produksi CPO Indonesia

meningkat menjadi 23,4 juta ton (Wiyanto, 2013). Peningkatan produksi CPO petani kelapa sawit tersebut tidak terlepas dari dukungan lembaga-lembaga yang terkait.

Kelembagaan adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan (Koentjaraningrat, 2011).

Menurut Koentjaraningrat (2011), Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan di bidang pertanian. Dalam sistem produksi perkebunan kelapa sawit rakyat terdapat banyak lembaga yang berperan terkait dengan akses input, akses finansial, akses akses pasar, akses informasi dan teknologi, akses lahan dan akses kelembagaan. Studi ini bertujuan untuk melihat lembaga-lembaga apa saja yang terkait dalam sistem produksi kelapa sawit dan apa saja peran lembaga-lembaga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Lokasi studi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa petani kelapa sawit rakyat (pola PIR) di wilayah ini sudah mendapat sertifikat RSPO sehingga lembaga-lembaga yang terlibat diduga telah melaksanakan perannya secara optimal. PT. Inti Indosawit Subur, perusahaan yang mengolah TBS petani terlebih dahulu sudah mendapatkan sertifikat RSPO. Fokus penelitian ini adalah petani kelapa

sawit rakyat pola plasma PT. Inti Indosawit Subur yang tergabung dalam KUD Bakti. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April 2014.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer mencakup profil petani sampel, keragaan kebun kelapa sawit petani, dan persepsi petani tentang kelembagaan yang terkait dengan produksi kelapa sawit. Data-data tentang lembaga-lembaga yang relevan juga dikumpulkan seperti profil perusahaan inti/mitra, profil KUD, peran LSM dan lembaga lainnya. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain data produksi TBS, harga TBS, penyaluran pupuk, harga pupuk, kontrak, dokumen legalitas lahan dan usaha perkebunan, dokumen analisa dampak lingkungan dan sosial.

Studi ini dilakukan dengan metode survei. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian dan wawancara dengan petani sampel. Pemilihan sampel dilakukan dengan *Simple random sampling* untuk petani kelapa sawit rakyat pola plasma dan *expert sampling* untuk lembaga yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit rakyat pola plasma. Populasi penelitian ini adalah petani plasma perusahaan PT. Inti Indosawit Subur yang berjumlah 219 petani yang terdiri dari sebelas kelompok tani. Data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan

pengelola lembaga-lembaga yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit rakyat pola plasma seperti PT. Inti Indosawit Subur, KUD Bakti, bank, BPN, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Aparat Desa Trimulya Jaya, Dinas-dinas terkait, WWF Indonesia, pedagang perantara. Data sekunder diperoleh dari literatur dan laporan-laporan yang relevan dengan penelitian ini seperti dokumen dan data-data yang diperoleh dari perusahaan, koperasi, laporan dan hasil penelitian terdahulu, dan instansi yang terkait.

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tujuan nomor satu dan dua dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.

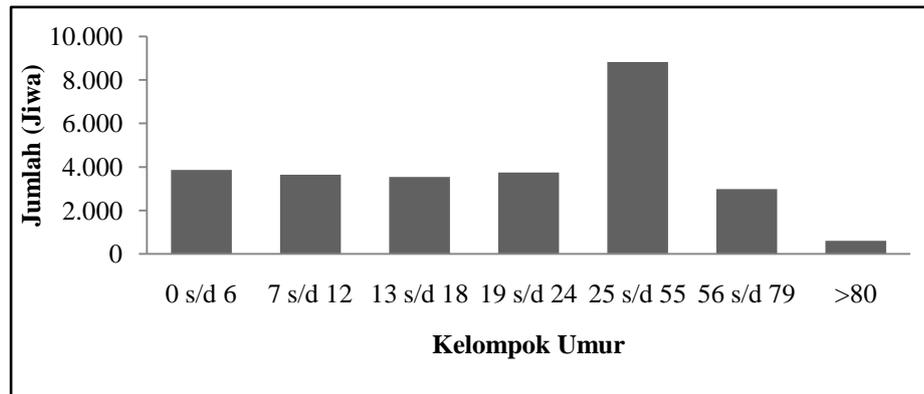
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Ukui merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Secara geografis, batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

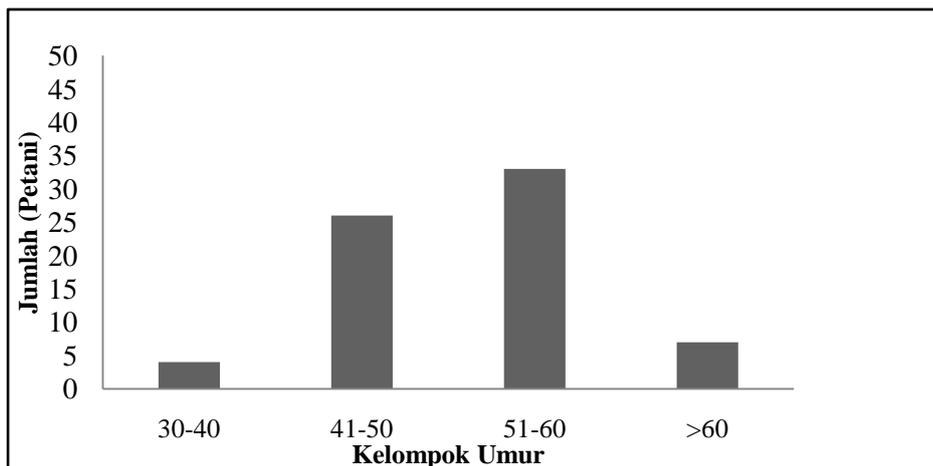
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung

Keadaan Umum Penduduk



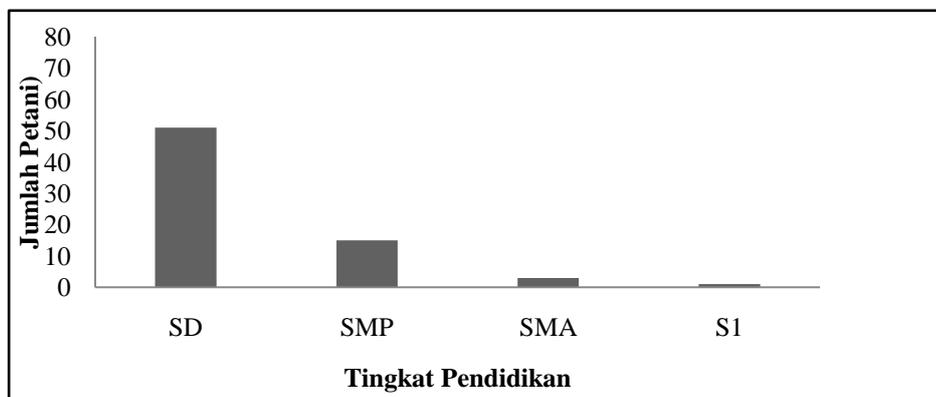
Gambar 1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Ukui Menurut Kelompok Umur pada Tahun 2013

Identitas Responden Umu



Gambar 2. Distribusi Tingkat Umur Petani Pola Plasma

Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Distribusi Tingkat Pendidikan Petani Pola Plasma

Mekanisme Sertifikasi RSPO Petani Pola Plasma

Prosedur proses sertifikasi petani pola plasma adalah sebagai berikut:

1. Petani plasma yang ingin disertifikasi dapat mengajukan permohonan kepada perusahaan inti/mitra atau jika perusahaan inti/mitra sudah mendapatkan sertifikat RSPO petani plasma dapat diikutsertakan dalam proses sertifikasi perusahaan inti.
2. Petani plasma yang siap disertifikasi diberikan pelatihan (Dinamika kelompok, *Good Agriculture Practice* (GAP), Panen, Pemupukan, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Pestisida terbatas, kebakaran lahan, dan pelatihan lain yang diperlukan dalam pemenuhan sertifikasi RSPO.
3. Proses sertifikasi yang paling penting adalah semua kegiatan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit petani dan lembaga petani didokumentasikan secara terpusat di suatu sekretariat, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja.
4. Setelah proses persiapan dilakukan, auditor eksternal akan diundang untuk mengaudit petani plasma dan perusahaan induknya.
5. Audit yang dilakukan mengacu pada prinsip dan kriteria RSPO untuk petani plasma, perusahaan dan juga standar sertifikasi ranta isuplai RSPO.

6. Bila audit berhasil, petani plasma dan perusahaannya dinyatakan mendapatkans ertifikat RSPO.

Lembaga-Lembaga yang Terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat pola plasma

Sejumlah lembaga terlibat dalam sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit, mulai dari awal penanaman sampai dengan pengolahan TBS bahkan hingga menghasilkan produk-produk olahan (dari hulu ke hilir). Setiap lembaga mempunyai peran masing-masing dalam sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit rakyat (petani pola plasma) di Desa Trimulya Jaya Kecamatan Ukui. Lembaga yang terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Pola Plasma adalah Perusahaan inti, KUD Bakti, Bank, BPN, Disbun, Pemerintah Desa, Pedagang Perantara, WWF dan Ketua KT.

Profil Lembaga yang Terkait dengan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Plasma PT. Inti Indosawit Subur

PT. Inti Indosawit Subur memiliki lahan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Air Hitam dan Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. PT. Inti Indosawit Subur merupakan bagian dari Asian Agri yang mengelola 27 kebun sawit dan 19 pabrik serta bermitra dengan 29.000 petani yang mencakup sebelas kebun di

Sumatera. Pembukaan lahan yang dilakukan PT. Inti Indosawit Subur dimulai pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2000.

Pada tahun 2000 PT. Inti Indosawit Subur kembali membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan adalah 253 hektar. Pada tahun 2014 luas lahan yang dimiliki PT. Inti Indosawit Subur adalah 4.271 hektar yang terletak di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Selain kebun inti, perusahaan ini juga bermitra dengan petani rakyat khususnya petani Trans-PIR yang ada di Kecamatan Ukui. Luas lahan yang dimiliki oleh perusahaan inti lebih sedikit dari yang dimiliki PIR-Trans. Perusahaan inti hanya memiliki lahan kebun sawit dengan luas adalah 4.271 hektar, sedangkan luas lahan kebun sawit yang dimiliki PIR-Trans adalah 7.334 hektar.

KUD Bakti

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Petani plasma PT. Inti Indosawit Subur tersebar dan menjadi anggota di beberapa KUD seperti KUD Bakti, KUD Bina Usaha Baru, dan KUD Bukit Jaya.

Studi ini difokuskan pada KUD Bakti yang didirikan pada tanggal 15 November 2001 dan berbadan hukum nomor: 39/BH/KDK/2.1/IV/2002. Petani sawit plasma yang tergabung dalam KUD Bakti terdiri dari 11 Kelompok Tani (KT) dengan 224 anggota. Anggota KUD Bakti dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan dan sampai pada saat ini anggota KUD Bakti berjumlah 274

orang yang terdiri dari 11 Kelompok Tani (KT) plasma dan 14 kelompok tani (KT) swadaya.

Bank

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabahnya. Menurut Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Hendra, adanya sertifikasi RSPO memberikan pengetahuan kepada petani tentang pentingnya melakukan praktek perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan dan berkelanjutan. Visi dan misi bank pada umumnya adalah melayani masyarakat di bidang keuangan tanpa adanya diskriminasi.

Syarat dan prosedur peminjaman dana bank adalah calon nasabah mengajukan diri sebagai calon peminjam dengan melengkapi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank seperti:

1. Wajib memiliki usaha, minimal sudah berjalan enam bulan.
2. Fotokopi KTP suami-isteri (masing-masing 2 lembar).
3. Fotokopi kartu keluarga (1 lembar).
4. Pas foto suami-isteri ukuran 3x4 (masing-masing 1 lembar).
5. Surat keterangan usaha asli dari kepala desa.
6. Fotokopi agunan (SHM/SKGR/SKRPT/BPKB).

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non-kementerian dan bertanggung jawab kepada presiden (sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). BPN melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional dan regional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku.

Visi BPN adalah berkenaan dengan upaya untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan visi dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional, maka dalam rangka pembangunan pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan pertanahan tahun 2010 – 2014 yang merupakan cita-cita yang diwujudkan kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yaitu : menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan berkeadilan serta berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Misi BPN adalah mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat.
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik lahan.
4. Berkelanjutan system kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses eluas-luasnya kepada generasi yang akandatang.

Fungsi lembaga BPN adalah merumuskan kebijakan nasional di bidang pertanahan, perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dan pengaturan serta penetapan hak-hak atas tanah.

Dinas Pekebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Visi Dinas Pekebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan adalah terwujudnya optimalisasi fungsi hutan dan lahan serta pembangunan perkebunan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat mandiri tahun 2013 - 2016. Misi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan penyelenggaraan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan dan lahan.
3. Mewujudkan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan.
4. Mewujudkan dan meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
5. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan.
6. Mewujudkan peningkatan sumber daya petani perkebunan yang berkualitas dan memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat.
7. Mewujudkan agroindustri yang berbasis perkebunan.

Desa Trimulya Jaya

Pada tahun 2012 Desa Trimulya Jaya merupakan sebuah dusun dari Desa Bukit Jaya bernama Dusun Trimulya. Kemudian berdasarkan PERDA Kabupaten Pelalawan nomor 61 tahun 2002, Desa Trimulya Jaya dimekarkan,

sehingga Dusun Trimulya menjadi Desa Trimulya Jaya. Luas wilayah Desa Trimulya Jaya kurang lebih 582 hektar. Adapun batas wilayah Desa Trimulya Jaya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Air Emas
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Bukit Jaya
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Bukit Gajah
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kampung Baru

Pedagang Perantara

Pedagang perantara atau tengkulak merupakan lembaga informal yang terbentuk, karena ada unsur saling membutuhkan antara petani kelapa sawit dan tengkulak. Menurut Sukimin (pedagang perantara), seiring berjalannya waktu jasa pedagang perantara menjadi tergeser karena petani menggunakan jasa KUD Bakti untuk penjualan TBS. Narno, ketua KUD Bakti, menambahkan bahwa setelah petani pola plasma mendapatkan sertifikat RSPO semua proses penjualan TBS dilaksanakan oleh KUD Bakti.

WWF Indonesia

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia merupakan salah satu organisasi konservasi terbesar di Indonesia yang telah memulai kegiatannya sejak tahun 1962. Pada tahun 1998 WWF Indonesia resmi menjadi lembaga nasional yang memiliki badan hukum. WWF mempunyai kantor cabang yang terletak di Jalan Cemara Kipas, Pekanbaru, Provinsi Riau. Misi utama WWF Indonesia adalah melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan

keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Misi dari WWF Indonesia dapat dicapai melalui:

1. Menerapkan dan mempromosikan praktek-praktek konservasi terbaik yang berbasis sains dan inovasi.
2. Memfasilitasi kelompok-kelompok yang siap menjadi agen pelestarian lingkungan hidup.
3. Mempromosikan pelestarian lingkungan hidup.

Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan lembaga pertanian informal yang ada di pedesaan. Tujuan terbentuknya kelompok tani adalah untuk menyatukan misi dan visi dari setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Kelompok tani kelapa sawit pola plasma yang terdapat di Desa Trimulya Jaya berjumlah 11 kelompok.

Peran Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Kelembagaan perkebunan kelapa sawit merupakan wadah atau tempat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kelancaran proses produksi dan pemasaran TBS. Dengan adanya kelembagaan pertanian, maka kegiatan agribisnis perkebunan rakyat menjadi kuat, terkoordinasi dan saling berbagi informasi tentang praktek dan bisnis perkebunan kelapa sawit yang baik. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator dari peran kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat

menghadapi pasar global dapat dilihat 1.

Tabel 1. Peran Lembaga Perkebunan Kelapa sawit Pola Plasma dari Hulu Ke Hilir

| Lembaga yang Terkait | Indikator dan Peran Kelembagaan | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| | Akses Input | Akses Finansial | Akses Kelembagaan | Akses Lahan | Akses Informasi dan Teknologi | Akses Pasar |
| Perusahaan Inti | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| KUD Bakti Bank | √ | √ | √ | | √ | √ |
| Dinas Perkebunan BPN | | | | √ | √ | |
| Pemerintah Daerah Tengkulak | | | | √ | | |
| WWF | | | | | √ | |
| Ketua KT | | | √ | | | |

Sumber: Data Olahan, 2014

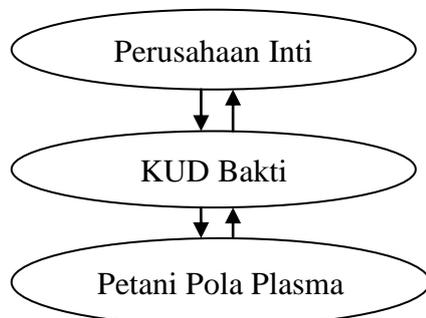
Keterangan :

√ : Peran Lembaga

Akses Input

Pupuk dan Pestisida

Akses input adalah kemudahan yang dapat dirasakan petani dari lembaga pertanian yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida dan bibit. Proses mendapatkan pupuk bagi petani kelapa sawit pola plasma diilustrasikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme Akses Input Petani Pola Plasma

Semua Pupuk yang dibutuhkan oleh petani kelapa sawit pola plasma

dipasok dari perusahaan inti/mitra. Perusahaan menyalurkan pupuk melalui koperasi berdasarkan permintaan koperasi dan jumlah kebutuhan petani. Koperasi selanjutnya menyalurkan pupuk kepada petani kelapa sawit pola plasma. Biaya pengadaan pupuk akan dibebankan kepada petani melalui pemotongan hasil penjualan TBS.

Menurut Purba selaku manajer petani plasma, PT. Inti Indosawit Subur terlebih dahulu melakukan analisis tanah, mengambil sampel daun dan menganalisis kebutuhan pupuk dalam satu hektar yang dibutuhkan petani plasma. Waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis pupuk dan jenis pupuk yang akan digunakan oleh petani plasma kurang lebih dua sampai tiga hari. Setelah analisis selesai, tim dari perusahaan mengadakan pertemuan dengan

pengurus koperasi dan ketua kelompok tani untuk menyampaikan hasil analisis.

Koperasi dan ketua kelompok tani menjelaskan kepada petani kelapa sawit tentang hasil analisis dari perusahaan inti/mitra. Menurut Juminianto, salah satu ketua kelompok tani plasma, pupuk yang disediakan perusahaan kepada petani plasma adalah pupuk paket.

Pupuk paket adalah pupuk yang memiliki standar yang baik dan sudah dianalisis terlebih dahulu oleh perusahaan serta disesuaikan dengan kondisi tanah yang dimiliki oleh petani plasma. Jenis pupuk yang terdapat dalam pupuk paket adalah kieserit, MOP dan urea. Pupuk yang disediakan terdiri dari paket A dan paket B. Kedua paket pupuk ini harganya berbeda-beda. Harga pupuk paket A sekitar Rp. 700.000,- – Rp 800.000,- sedangkan paket B berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 600.000,-.

Bibit

Bahan tanaman yang baik dan berkualitas akan menghasilkan produksi TBS yang maksimal. Benih dan bibit kelapa sawit yang baik dapat diperoleh melalui lembaga produsen benih/bibit yang memiliki sertifikat serta diakui oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang menyediakan bibit berkualitas dan bersertifikat, tetapi petani tidak memiliki akses untuk mendapatkan benih/bibit tersebut. Pada umumnya benih/bibit bersertifikat tidak dapat dibeli dalam jumlah sedikit. Petani perseorangan biasanya sulit untuk mendapatkan akses pada benih/bibit. Saat ini benih/bibit bersertifikat mulai dapat

diakses secara berkelompok melalui kelembagaan koperasi atau kelompok tani.

Akses Finansial

Perusahaan inti (PT. Inti Indosawit Subur) memberikan pinjaman kepada petani plasma sebesar Rp. 9.250.000,-. KUD Bakti juga memberikan pinjaman kepada anggota koperasi tetapi dalam jumlah yang tidak besar. Sebagian petani juga mendapatkan pinjaman dari beberapa bank lokal untuk peningkatan usaha kebun kelapa sawit sesuai syarat dan ketentuan dari pihak bank.

Akses Kelembagaan

Akses kelembagaan adalah kemudahan yang dapat dirasakan petani ketika berkomunikasi kepada semua *stakeholders* yang terkait dalam perkebunan kelapa sawit. Menurut Heru Kepala Seksi Bina Usaha Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan, manfaat langsung dari sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) adalah mendekatkan petani dengan lembaga-lembaga pertanian karena antara lembaga dengan petani ada unsur saling membutuhkan. Peran perusahaan inti adalah selalu merespon masalah-masalah yang dihadapi oleh petani pola plasma. Peran KUD Bakti adalah selalu bersedia memberikan masukan dan arahan kepada petani, ketika petani menghadapi masalah. Peran ketua kelompok tani adalah memberikan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan kelembagaan.

Akses Lahan (Legalitas Tanah)

Akses lahan adalah kemudahan yang didapat oleh petani pola plasma untuk mengakses legalitas lahan. Prinsip kedua RSPO adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. RSPO mewajibkan semua petani yang ingin menjadi anggota harus memiliki sertifikat lahan yang sah secara hukum. Sertifikat lahan yang dimaksud adalah sertifikat hak milik (SHM) untuk petani swadaya dan plasma, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) dan AMDAL.

Pengurusan SHM yang dimiliki petani pola plasma yaitu dilakukan oleh perusahaan inti/mitra ketika mulai merencanakan membangun kebun plasma. Perusahaan inti selanjutnya mengurus SHM petani plasma secara keseluruhan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

RSPO mewajibkan petani plasma memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) yang diberikan oleh Bupati/Walikota. STD-B menunjukan *legalitas* suatu usaha yang di jalankan dalam perkebunan kelapa sawit. STD-B diberikan apabila petani telah memiliki lahan yang legalitasnya jelas.

Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan dokumen yang menunjukkan pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sebelum pembangunan kebun. Petani plasma dievaluasi bersamaan dengan AMDAL perusahaan, sedangkan untuk petani swadaya diwajibkan memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 13/2010.

Akses Informasi dan Teknologi

Pada awalnya petani pola plasma mendapat pelatihan dan penyuluhan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan, tetapi hal ini tidak bertahan lama karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya komunikasi antara penyuluh dengan petani pola plasma. Selanjutnya petani plasma mendapatkan akses informasi dan teknologi dari perusahaan inti/mitra. Petani mendapatkan penyuluhan dan pelatihan tentang budidaya kelapa sawit dan sertifikasi RSPO dari staf khusus yang telah disediakan oleh perusahaan inti bekerja sama dengan KUD Bakti.

Akses Pasar

Akses pasar adalah kemudahan yang didapat oleh petani untuk menjual TBS ke pabrik. Petani plasma memiliki kontrak dengan perusahaan inti/mitra yang menjamin semua TBS yang dihasilkan diproses di pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan ini. TBS yang dapat dijual ke perusahaan inti/mitra adalah TBS yang dihasilkan dari kebun plasma. Penjualan TBS dilakukan melalui KUD Bakti yang bersama-sama dengan staf perusahaan mengkoordinasikan pemanenan pada setiap kelompok tani. Hasil penjualan TBS diserahkan melalui KUD Bakti untuk selanjutnya diserahkan kepada petani setelah dipotong kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Sistem pemasaran ini tidak berlaku bagi TBS yang dihasilkan di lahan pekarangan petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang analisis kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat pola plasma menghadapi pasar global di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang didapat adalah:

1. Lembaga yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit rakyat pola plasma adalah PT. Inti Indosawit Subur, KUD Bakti, bank (Bank BRI, Bank Riau dan Bank BNI), Pemerintah Daerah (Bupati, Camat, dan Kepala Desa), Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pelalawan, BPN, tengkulak, WWF, dan ketua kelompok tani.
2. Peran masing-masing lembaga sebagai berikut :
 - a) Lembaga yang berperan dalam penyediaan akses input perkebunan kelapa sawit adalah perusahaan inti (PT. Inti Indosawit Subur) bekerja sama dengan KUD Bakti.
 - b) Lembaga yang berperan dalam penyediaan akses finansial adalah perusahaan inti, bank (Bank BRI, Bank BNI dan Bank Riau), KUD Bakti.
 - c) Lembaga yang berperan dalam akses kelembagaan adalah KUD Bakti, PT. Inti Indosawit Subur dan ketua kelompok tani.
 - d) Lembaga yang berperan dalam akses lahan (legalitas lahan) adalah perusahaan inti, Pemda Kabupaten Pelalawan (Bupati, Camat, dan Kepala Desa), Dinas Perkebunan & Kehutanan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- e) Lembaga yang berperan dalam akses informasi dan teknologi adalah PT. Inti Indosawit Subur, WWF Indonesia dan KUD Bakti.
- f) Lembaga yang berperan dalam penyediaan akses pasar adalah KUD Bakti, PT. Inti Indosawit Subur dan tengkulak.

SARAN

1. Diharapkan pada semua pihak yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit yang membina dan membantu petani mendapatkan sertifikat RSPO agar terus melakukan pembinaan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki petani.
2. Petani yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat diatasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit.
3. Koperasi dan perusahaan diharapkan mampu menjadi lembaga perkebunan kelapa sawit dan berperan dalam peningkatan pendapatan dan hasil TBS petani.
4. Pemerintah Pusat harus memberikan regulasi yang jelas dan tepat yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit rakyat dalam pengurusan sertifikasi ISPO dan mendukung petani kelapa sawit rakyat dalam pengurusan sertifikasi RSPO.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, A.U. 1992. **Kelapa Sawit** (Elaeis guineensis Jacq). Pusat Penelitian Perkebunan Marihat. Bandar Lampung. Malang.
- Munandar Iman Adis. 2010. **Analisis Strategis Bersaingan pada Rantai Nilai Kelapa Sawit** (Study kasus PT. Buditama Gunajaya Agro). Jurnal Kelapa Sawit, Volume 5: 1-2.
- Soekartawi. 2003. **.Agribisnis Pertanian**.<http://www.com/news/read/2013/05/11>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2013.
- Suherman. 2000. **Produksi Kelapa Sawit**.<http://infosawit.com/index.php/berita-lintas>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2013.
- Koentjaraningrat. 2011. **Peran Kelembagaan Agribisnis**. <http://kukuhprakoso.wordpress.com/2012/02/29/peran-kelembagaan-agribisnis/>. Diakses tanggal 16 Oktober 2013.